

IMPLEMENTASI GCG DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi kasus di RS. 'Aisyiyah Bojonegoro)

Achmad Fajaruddin
fajaruddin.Zleemail.com

Intisari

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu paradigma baru yang pada akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan terutama pada kalangan dunia bisnis. Apalagi pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang disusul oleh krisis global pada tahun 2008, implementasi GCG merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan, di beberapa negara maju, GCG saat ini sudah dianggap sebagai suatu asset perusahaan yang banyak mendatangkan beberapa manfaat, misalnya GCG dapat meningkatkan nilai tambah (value added) bagi pemegang saham dan mempermudah akses ke pasar modal domestik maupun global (internasional) serta memperoleh citra (image) yang positif dari publik .

. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip GCG masih sangat sulit sekali dilakukan di Indonesia, hal ini dikarenakan masih tingginya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh kalangan baik pejabat pemerintah, pengusaha, pebisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika banyak perusahaan atau unit-unit usaha yang menjalankan aktivitas usahanya dengan mengusung nilai-nilai islam sebagai pondasinya, salah satunya adalah Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA) Bojonegoro, maka bagaimana jika implementasi GCG dilakukan pada perusahaan yang berbasis nilai Islam dalam operasi usahanya tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Analisa data yang peneliti gunakan adalah dengan metode reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan .

• Dosen Institut Studi Islam Darussalam Gontor

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi GCG di RSA Bojonegoro sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut karena RSA Bojonegoro merupakan amal usaha bidang kesehatan yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) muslim yaitu Muhammadiyah. Yang mana prinsip-prinsip GCG ternyata selaras, khususnya dengan ajaran agama Islam, yaitu pada dimensi moral dari implementasi GCG terletak pada prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip keterbukaan (*transparency*), prinsip kewajaran (*fairness*) dan prinsip kemandirian (*independency*). Kemudian dalam perspektif Etika Bisnis Islami, implementasi GCG di RSA Bojonegoro memiliki kesesuaian dengan beberapa nilai dasar islami diantaranya adalah nilai tuhid, nilai *khilafah*, nilai ibadah, kemudian nilai *tazkiyah*, dan nilai *ihsan*.

Kata Kunci: Implementasi, *Good Corporate Governance*, Etika Bisnis Islami.

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) is a new paradigm which is nowadays became the topic of discussion especially in the world of business. Moreover, after monetary crisis on 1997-1998 and global crisis on 2008, implementation of GCG is a must which can't be bargained again. Indeed, in the development country, recently, GCG has been admitted as corporation asset which added many benefits, for instance, it increase value added for stock holder and makes easier for access to the capital domestic or international (global) market also it obtains positive image from publics.

But then, the implementation of GCG is still most difficult in Indonesia, it caused from the highest practice of corruption, collusion, and nepotism acted by government employee, entrepreneurs, bussinesman, and

others. Therefore, recently, many corporation carried out their business activities with implementing Islamic value as the basic, one of the example is "Aisyiyah" Hospital Bojonegoro, so, how the implementation of GCG if is it implemented by corporation based on Islamic value in his business activities?

This reaserach used qualitative approach with cases study. Data analysis which used by researcher is datas reduction method, datas presentation, and taking conclusion.

The result of reaserch is GCG implementation at Aisyiyah hospital Bojonegoro has been implemented well, it caused of Aisyah hospital Bojonegoro is a charity health activities operated/managed by social Muslim organisation Muhammadiyah. Which, the principles of GCG are equal especially with Islamic teaching/value, such as: moral dimension of GCG at accountability principle, responsibility principles, transparancy principles, and fairness principles. Than, in the ethics of Islamic Business perspective, implementation of GCG at Aisyiyah Hospital Bojonegoro, has suitabelity with some basic Islamic values such as oneness (*rauhid*) value, vicegerant (*Khilafah*) value, worshipping (*ibadah*) value, purification (*razkivah*) value, and charity/good deeds (*Ihsan*) value.

Keywords: Implementation, *Good Corporate Government* (GCG), *Ethics of Islamic Business*.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Hal tersebut merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai dalam beberapa tahun ini, terutama sejak krisis ekonomi pada tahun 1997. Dewasa ini, tuntutan atas implementasi prinsip-prinsip GCG pada perusahaan dan lembaga-lembaga usaha menjadi permasalahan yang sangat penting. Penerapan **GeG** juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan

lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan. Penerapan prinsip-prinsip GCG juga secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan.'

Lemahnya implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), disebabkan karena pelaku bisnis seringkali menjadikan keuntungan materi yang sebesar-besarnya sebagai suatu tujuan utama dalam melakukan aktivitas bisnis. Demi tercapainya tujuan tersebut, segala cara mulai dari yang baik bahkan cara yang kotor akhirnya digunakan oleh pebisnis. Hal semacam itu lebih dikenal dengan istilah 'bisnis amoral' Artinya, tidak ada lagi aturan, norma maupun etika karena yang ada hanyalah menjadikan bisnis sebagai arena pertempuran untuk saling menjatuhkan, mengalahkan, dan membunuh pesaing bisnis yang lain.'

Dalam pengelolaan bisnis, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan bisnis yang senantiasa berlandaskan pada etika, sehingga ada jaminan bahwa roda bisnis akan berjalan dengan baik, aman, nyaman, serta sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, keuntungan yang menjadi tujuan bisnis juga akan mudah dicapai, baik keuntungan finansial maupun keuntungan yang sifatnya immateri, yaitu nilai-nilai yang lahir akibat adanya bisnis yang beretika. Adapun Islam, menempatkan aktivitas perdagangan (bisnis) dalam posisi yang strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Islam memberikan tuntunan untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan berdasarkan etika terkonsip dalam satu tatanan etika bisnis Islami. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya (pebisnis). Oleh sebab itu, salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlaq manusia yang telah rusak. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, setiap pebisnis, terutama pebisnis muslim harus meneladani bisnis Rasulullah yang senantiasa memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *hunun khuluq*. Dalam Islam diajarkan adanya keseimbangan

¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Cetakan I. (Yogyakarta: Total Media, 2007), p. 2

² [ohan Arifin, S.Ag., M.M. *Etika Bisnis Islami*. Cetakan I. (: Semarang: Walisongo Press, 2009), p. 1

rujuan dalam menjalankan roda bisnis, yaitu tujuan untuk dunia (materi) dan tujuan untuk akhirat (ibadah). Kedua tujuan inilah yang membedakan bisnis Islami dengan bisnis modern pada umumnya.'

Demikian halnya dengan rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang baik, harus bekerja dan dikelola sesuai dengan aturan, norma-norma, serta kode etik yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena rumah sakit mempunyai sistem yang unik, selain menjalankan usaha bisnis, rumah sakit juga menjalankan kegiatan sosial." Dengan diterapkannya prinsip bisnis sosial dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, diharapkan dapat menghapus diskriminasi antara aktivitas ekonomi dengan ibadah yang pada akhirnya menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap rumah sakit. Apalagi rumah sakit yang berlebel syari'ah sebagaimana Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA) Bojonegoro, pengelolaan yang baik dan sesuai dengan etika bisnis Islami saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hal tersebut harus terealisasi dengan baik agar praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kode etik yang ada di rumah sakit seperti pelayanan yang kurang ramah, mutu yang tidak baik, dugaan malapraktik, adanya benturan kepentingan, dan lain sebagainya tidak terjadi lagi.

B. Landasan Teori

Good Corporate Governance merupakan kebutuhan bagi suatu perusahaan, baik untuk pemilik perusahaan, pengelola, penasehat maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, semua unsur dalam perusahaan harus aktifberpartisipasi secara simultan dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. *Good Corporate Governance* secara teoretis bukanlah suatu yang baru bagi manajemen korporasi. Namun di Indonesia, konsep tersebut

³ Muhammad Yusuf, SE., MM. dan Wiroso, SE., MBA. *Bisnis Syari'ah*. Edisi I. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), p. 4

⁴ Laksono Trisnantoro. *Memahami Penggunaan Manajemen Rumah Sakit*. Cetakan II. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). p. 17

⁵ Niki Lukviarman. *Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa dalam Corporate Governance*. (Jurnal Siasat Bisnis, No.9, Vol2, 2004)

menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi di penghujung abad ke-20, tepatnya semenjak pasca krisis tahun 1997. *Good Corporate Governance* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil, diyakini akan memberi manfaat, baik bagi perusahaan, manajemen pekerja, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan aturan itu akan lebih mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (Direksi) dan pengawas (Komisaris), antara manajemen dan pekerja, antara manajemen dan pemegang saham, ataupun manajemen dan pemerintah serta lingkungan sosialnya.

Istilah *Good Corporate Governance (GCG)* telah banyak didefinisikan dalam berbagai macam literatur, tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lainnya, bergantung pada kecenderungan pihak yang mendefinisikan. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.⁶ *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, mendefinisikan bahwa *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemengku kepentingan, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.⁷ Secara umum *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan secara baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan, penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam

⁶Si Sulistyanto. *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?*, [Jurnal Widya Warta No.2 Tahun XXVI Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata, Semarang, 2003).

⁷Sony Warsono at all. *Corporate Governance Concept and Model*. Cetakan I, (Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2009), p. 13

perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan pentahapan berikut."

1. Tahap persiapan

- a. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya.
- b. *GCG Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan *Good Corporate Governance* saat ini.
- c. *GCG manual building* adalah langkah berikutnya setelah *GCG assessment* dilakukan.

2. Tahap Implementasi

- c. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*.
- d. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun.
- e. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan memberikan manfaat diantaranya yaitu:

⁸Thomas S. Kaihatu. *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No.1, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra. 2009.

1. Meminimalkan *agency cost* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen.
2. Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
3. Meningkatkan citra perusahaan, dengan pengelolaan perusahaan yang baik tentu akan dapat menarik minat dan kepercayaan para investor, sehingga akan sangat membantu usaha (bisnis) perseroan.
4. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang membrikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
5. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.
7. Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik Supravitno."

Selain membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, dalam operasional usahanya perusahaan juga membutuhkan etika bisnis. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk.⁹ Demikian halnya dapat jelaskan bahwa etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah, baik-buruk, halal-haram. Apalagi RSA Bojonegoro sebagai rumah sakit Islam tentunya etika bisnis yang diterapkan adalah etika bisnis Islami.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika di dalam Al Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adZ* (kesetaraan dan

⁹Supravitno G at all *Corporate Governance Perception Index 2008, Good Corporate Governance dalam Perspektif Manajemen Strategik*; Cetakan I. (Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2009), p. 32

¹⁰Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islam*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). p. 3

keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut dengan *Sayyi'at*.¹¹ Secara umum Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Nilai-nilai dasar etika bisnis dalam Islam adalah Tauhid, Khilafah, Ibadah, Tazkiyah dan Ihsan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sifat pendekatan ini lebih terbuka, artinya peneliti memberikan kesempatan kepada subvek untuk menjawab pertanyaan yang diajukan menu rut kerangka berpikir dan pengalaman mereka sendiri, bukan berdasarkan patokan-patokan jawaban yang telah dibuat oleh peneliti.¹² [enis penelitian adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.!' Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Analisa data yang peneliti gunakan adalah dengan metode reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian difokuskan di Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA) BOjonegoro sebagai objek penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Buclaya Perusahaan

Budaya perusahaan (*corporate culture*) adalah kumpulan nilai-nilai (*values*) dan unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. RSA Bojonegoro sebagai suatu amal usaha yang dikelola oleh persyarikatan Muhammadiyah, tentu budaya dan nilai-nilai yang tercermin di dalamnya adalah nilai-nilai atau budaya-budaya Islami.

¹¹ Muhammad *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002). p. 37.

¹²Riduan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan IV: (Bandung: Alfabeta). P.102

¹³Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Prakti*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002). p. 27

2. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di RSA Bojonegoro

Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA) Bojonegoro adalah amal usaha bidang kesehatan milik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro dan diberi tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif. RSA Bojonegoro tidak sarna persis dengan suatu perusahaan, sebagaimana di perusahaan-perusahaan, pemilik perusahaan adalah pemegang saham (*shareholder*), sedangkan di RSA Bojonegoro sebagai pemilik adalah PP Muhammadiyah yang merupakan induk organisasi yang memiliki badan hukum. PP Muhammadiyah memberikan amanat kepada (PDM) Bojonegoro untuk mendirikan RSA Bojonegoro sekaligus memimpin persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Adapun Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Bojonegoro merupakan unsur pembantu PDM Bojonegoro yang diserahi tugas sebagai penyelenggara RSA Bojonegoro. Sebagai pengelola tertinggi di RSA Bojonegoro adalah Direktur yang diangkat oleh MKKM Bojonegoro dengan persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur untuk memimpin dan mengelola seluruh kegiatan rumah sakit sesuai dengan visi, misi, dan tujuan amal usaha kesehatan. Dewan Direksi adalah jajaran pengelola yang terdiri dari Direktur dan para Wakil Direktur yang diangkat oleh MKKM Bojonegoro (AD/ART RSA Bojonegoro). Adapun hubungan kerja antara PDM, MKKM (Komisaris), dan Direktur dilandasi dan dijiwai oleh nilai Ukhuwah Islamiyah berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits. Sehingga, segala keputusan yang ada merupakan hasil dari kesepakatan bersama, bukan atas dasar keputusan dan kepentingan pribadi,

Dalam menjalankan operasional usahanya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan hal yang sangat penting bagi integritas Rumah Sakit 'Aisyiyah (RSA) Bojonegoro. Oleh karenanya, segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural, dan karyawan RSA Bojonegoro berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktek *Good Corporate Governance* yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik-praktek transparansi yang dijalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi rumah sakit. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance di dalam setiap kegiatan rumah sakit mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi yang kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal serta mendasarkan diri pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kepemimpinan. Standar dan perilaku pelayanan jasa rumah sakit serta tingkah-laku pribadi yang etis ditetapkan dalam kode etik dan pedoman tingkah laku yang berlaku untuk seluruh karyawan dan pengelola tanpa terkecuali, termasuk dokter mitra dan para karyawan kontrak serta para pihak yang bekerjasama dengan RSA Bojonegoro. Adapun sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, RSA Bojonegoro secara berkala melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara komprehensif untuk memantau serta mengevaluasi pengimplementasiannya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut (*action plan*), termasuk tindakan korektif (*corrective action*) apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

3. Organ RSA Bojonegoro

Manajemen RSA Bojonegoro meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ rumah sakit sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan rumah sakit dan implementasi *Good Corporate Governance*. RSA Bojonegoro mendorong organ rumah sakit agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab rumah sakit terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun pelestarian lingkungan.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada Direksi pada saat pengajuan rencana Kerja dan anggaran rumah sakit, mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit, melaporkan dengan segera kepada PDM Bojonegoro apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk segera mendapat perhatian PDM Bojonegoro. Komposisi Dewan Komisaris di RSA Bojonegoro terdiri dari paling tidak satu anggota dari MKKM dan yang lainnya dari pihak yang ditunjuk atau

ditentukan oleh PDM Bojonegoro. Sedangkan jumlah komposisi Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan RSA Bojonegoro itu sendiri.

Adapun Dewan Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola rumah sakit. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.¹⁴ Dewan Direksi di RSA Bojonegoro beranggotakan tiga komponen yaitu Direktur, Wakil Direktur Medik, dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan. Sedangkan pejabat struktural dan karyawan rumah sakit dalam melakukan tugas dan kewajibannya telah diatur dan dijelaskan dalam job descriptionnya masing-masing. Adapun karyawan yang ada di RSA Bojonegoro terdiri dari karyawan organik/kontrak tetap, dokter mitra, tenaga *outsourcing*, dan tenaga kontrak tidak tetap. Dalam hal ketenagaan, RSA Bojonegoro mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang diatur dalam peraturan rumah sakit. Seluruh karyawan organik/kontrak tetap dan tenaga tidak tetap harus beragama Islam, hal ini sesuai dengan kaidah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkaitan dengan ketenagaan yang ada di amal usaha rumah sakit. Dan untuk memperlancar serta memotivasi para karyawan agar dapat bekerja dengan optimal, maka RSA Bojonegoro selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan-karyawannya. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian honorarium yang sesuai dengan standar kepegawaian dan sesuai dengan haknya masing-masing.

4. Standar Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Audit Eksternal

RSA Bojonegoro memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut mewajibkan rumah sakit menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan .. ekuitas dan arus kas, serta pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan di RSA Bojonegoro betul-betul transparan dan tidak adanya penyelewengan-penyelewengan dalam laporan keuangan tersebut.

¹⁴ Wahyudin Zarkasyi. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan jasa Keuangan Lainnya*. Cetakan I. (Bandung: Alfabeta 2008). p. 37

Selain itu, RSA Bojonegoro juga senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan aset rumah sakit, Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas, dan efisiensi proses pengelolaan rumah sakit serta kepatuhan kepada perundang-undangan yang terkait. Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan oleh Organ Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertanggung jawab kepada Direktur rumah sakit. Misi SPI adalah membantu Direksi dan Manajemen dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan rumah sakit, melalui pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko, dan *corporate governance* berupa melakukan audit, konsultasi, memberikan rekomendasi yang independen dan obyektif serta inovatif.

Dalam hubungannya dengan auditor eksternal, RSA Bojonegoro selalu diaudit oleh lembaga audit dari MKKM wilayah. Dalam hal ini, karena RSA Bojonegoro terletak di wilayah Jawa Timur, maka yang mengadakan audit terutama keuangan dilakukan oleh lembaga audit dari MKKM Jawa Timur. Untuk rumah sakit-rumah sakit yang berada di bawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, masing-masing diaudit oleh lembaga audit dari MKKM sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Hal ini, selalu berjalan pada setiap tahunnya di RSA Bojonegoro demi keamanan aset rumah sakit dan ketepatan dalam laporan keuangan.

5. Kebijakan RSA Bojonegoro Mengenai Perilaku Etis/Etika Bisnis (*Code of Conduct*)

RSA Bojonegoro dalam melakukan aktivitasnya menerapkan standar etika yang harus dipatuhi dan ditaati. Dalam hal ini, karena RSA Bojonegoro merupakan rumah sakit yang dikelola oleh ormas Islam, maka etika yang diterapkannya pun tentu etika yang mengandung nilai-nilai Islami. Hal ini sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh MKKM Wilayah Jawa Timur sebagai acuan atas pelaksanaan operasional rumah sakit. RSA Bojonegoro menjalankan operasional usahanya dengan lingkup kegiatan usaha utama dibidang jasa kesehatan yaitu pelayanan pengobatan di rumah sakit. Untuk mempertahankan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan dalam seluruh aktivitasnya, maka pihak manajemen rumah sakit menganggap penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Karena tanpa diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di rumah sakit, maka

pencapaian visi rumah sakit yaitu untuk menjadi rumah sakit yang Profesional dan Islami akan sangat sulit terwujud.

Sebagai aturan yang harus dijalankan, RSA Bojonegoro melarang seluruh jajaran yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh unit kerja melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Disamping itu, RSA Bojonegoro juga menyadari bahwa jalannya operasional rumah sakit tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali rumah sakit. Oleh karena itu, pengelolaan risiko rumah sakit secara terintegrasi, optimal, dan berkesinambungan penting untuk selalau dilakukan. Hal tersebut diwujudkan dengan selalu melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal, sehingga atas dasar identifikasi itu, rumah sakit akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut. Misalnya, bekerja sama dengan pihak asuransi, atau dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Sebagai lembaga kesehatan umum, tentu dalam operasional usahanya, RSA Bojonegoro tidak dapat terlepas dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu, RSA Bojonegoro selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Karena hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap citra rumah sakit itu sendiri. Kepedulian sosial kemasyarakatan di RSA Bojonegoro diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial seperti pengobatan masal, pengobatan gartis, qur'ban pada hari raya Idul Adha, sunatan masal, dan lain sebagainya. Dengan demikian hubungan yang baik antara rumah sakit dan masyarakat akan selalu terjalin dan terbina dengan baik. Demikian halnya dengan penyuluhan-penyuluhan, seminar-seminar umum dengan mengangkat topik tentang kesehatan, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih tanggap dan cerdas dalam menjaga kesehatan.

6. Nilai-nilai Erika Bisnis Islami dalam Implementasi *Good Corporate Governance* di RSA Bojonegoro

Konsep tentang *Good Corporate Governance* secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ternyata selaras, khususnya dengan ajaran agama Islam. Dimensi moral dari implementasi *Good Corporate*

Governance antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip keterbukaan (*transparency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*) Effendi (2005).¹⁵

Good Corporate Governance sebenarnya adalah sebuah 11 perusahaan untuk mendekati garis orbit menuju pusat spiritual. *transparency* (keterbukaan), *responsibilities* (bertanggungjawab), *accountabilities* (kepercavaan), *fairness* (keadilan) dan *social awam* (kepedulian sosial). Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial, itulah yang menjadi tujuan *Good Corporate Governance*. [jika dibandingkan dengan sikap Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu, seperti *honest* (*siddiq*), *accountable* (*amanah*), *cooperative* (*tablig*), *smart* (*fathonah*), atau dengan kata lain: jujur dan benar, bisa dipercaya, bertanggungjawab, memiliki kecerdasan, serta peduli terhadap lingkungan/sosial. Perbedaan signifikan terletak pada jenis *drive* atau motivasinya. Motivasi demi kepemilikan materi dan pemuas ambisi seringkali menjadi dua motif utama seseorang menerapkan *Good Corporate Governance* hingga pada akhirnya tetap bermuara pada kehancuran bisnisnya.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di RSA Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tauhid

Tauhid sebagai sentral dan dasar keyakinan agama Islam, menjadi sumber totalitas sikap dan pandangan hidup umat dalam keseluruhan dimensi kehidupan. Islam sebagai agama, hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sarna dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanva."

¹⁵ Muhammad Arief Effendi. *Peran Etika Bisnis dan Moralitas Agama Dalam Implementasi GeG*. (Jurnal Ilmiah, Vol 2 No.1 di terbitkan oleh STEI Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia LPPI, 2005)

¹⁶ M. Amin Rais. *Arti dan Fungsi Tauhid*. [urnal Al Manar. Edisi I. 2004

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). P. 74

Demikian halnya dengan RSA Bojonegoro, dalam pelaksanaan operasionalnya, usaha-usaha yang dilakukan selalu menitik beratkan pada nilai-nilai etika. Semua pasien yang datang ke rumah sakit akan ditangani sesuai dengan kebutuhannya tanpa harus membedakan dari golongan dan agama apa mereka berasal. Selama ini, pasien yang datang ke RSA Bojonegoro terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan dari berbagai lapisan masyarakat, dari pejabat, guru, karyawan, petani, pedagang, dan lain sebagainya.

2. Nilai Nilai Khilafah

Eksistensi dari suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya kontrak sosial dengan masyarakat disekitarnya, untuk itu suatu perusahaan dituntut untuk bisa memberikan *maslahah* kepada masyarakat yang ada disekitarnya, wujud adanya *maslahah* tersebut salah satunya dengan memiliki rasa tanggung jawab sosial dalam membina masyarakat agar memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik." Sama halnya dengan RSA Bojonegoro, selain memberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit sebagai kewajibannya kepada masyarakat, RSA Bojonegoro juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pengobatan masal, pengobatan gratis, sunar masal, qurban, perivaluran zakar, dan lain sebagainya, Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan cara kerjasama dengan institusi-institusi terkait ataupun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga, RSA Bojonegoro tidak hanya mampu mengembangkan rumah sakit dari sisi profit dan fisiknya saja, akan tetapi usaha untuk membina masyarakat dan memberikan pemahaman tentang arti penting hidup sehat agar masyarakat dapat hidup dengan sehat telah dilakukan.

3. Nilai Ibadah

Ibadah dalam konsep Islam berdimensi ganda, bersifat vertikal, yaitu ketaatan yang langsung kepada Allah SWT. dan ketaatan yang bersifat horizontal, yang meliputi semua segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, komitmen seorang muslim atas kewajibannya terhadap Allah SWT, sama nilainya dengan komitmen atas kewajibannya terhadap saudaranya sesama manusia,

Begitu halnya dengan RSA Bojonegoro yang selalu menanamkan nilai-Islam (dalam nilai-nilai ibadah dalam melakukan pelayanan dan tata kelola usahanya. Hal tersebut tercermin dari tingkah laku dan perbuatan

para Direksi, manajer, dan karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Begitu juga usaha-usaha penanaman nilai-nilai Islam atau ibadah selalu dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dan Kepala Sub Bagian Dakwah dan Citra (Kasubag. Dakwah & Citra) dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahajjud bersama, duha bersama dan lain-lainnya, sehingga para pelaku operasional rumah sakit menyadari bahwa disamping melaksanakan tugas yang mulia dalam bentuk membantu pelayanan dan penyembuhan para pasien juga diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT.

4. Nilai Tazkivah

Nilai tazkiyah dalam suatu bisnis tercermin dalam tiga hal pokok yaitu kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Kejujuran dalam operasional di RSA Bojonegoro selalu ditanamkan baik jujur dalam informasi yang disampaikan, jujur dalam melaksanakan tugas, jujur dalam tindakan, jujur dalam keputusan, ataupun dalam laporan keuangan serta dari beberapa aspek lainnya. Sedangkan keadilan disini bahwa RSA Bojonegoro selalu berupaya maksimal untuk berlaku adil baik kepada karyawan ataupun kepada pasien serta pihak-pihak terkait lainnya. Hal tersebut terwujud dalam bentuk pemberian gaji yang selayaknya bagi karyawan, kesejahteraan, mengutamakan musyawarah dalam berbagai konflik atau kepentingan sehingga keputusan yang ada memuaskan semua pihak.

Adapun keterbukaan di RSA Bojonegoro bahwa segala informasi harus disampaikan apa adanya dan sesuai faktanya. Untuk menunjang hal itu, maka di RSA Bojonegoro selalu diadakan rapat bulanan untuk struktural dalam rangka mengevaluasi kinerja selama satu bulan serta untuk mencari solusi-solusi atas permasalahan yang timbul dan dihadapi. Demikian halnya juga pada bidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan terdapat *morning report* yang di pandu oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis (Kabid. Yan. Med.) dan Kepala Pelayanan Keperawatan (Kabid. Yan. Keprwtn.) yang dilaksanakan pada setiap pagi untuk saling memberikan informasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dua puluh empat jam yang lalu dan untuk mencari pemecahannya.

5. Nilai Ihsan

Ihsan adalah suatu usaha untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi,

sehingga memperoleh hasil maksimal. Ihsan tidak sama dengan *per/eksionisme*, melainkan *optimalisme*. *Per/eksionisme* tidak dianjurkan dalam agama Islam, karena hal tersebut tidak mungkin akan dicapai oleh manusia. Oleh karena itu RSA Bojonegoro dalam operasional usahanya selalu berbenah dan berusaha semaksimal mungkin agar dapat betul-betul menjadi rumah sakit yang ideal dan berkualitas. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk rekrutmen tenaga yang betul-betul mumpuni dan selektif sehingga dapat diperoleh tenaga-tenaga yang dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu juga dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas karyawan yang ada di RSA Bojonegoro, pihak rumah sakit mengadakan baik dalam bentuk pelatihan, workshop, seminar, atau studi banding. Karena Islam juga mengajarkan konsep ihsan, yang menyatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika tidak demikian, berarti kita mengalami kemunduran.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Implementasi *Good Corporate Governance* di RSA Bojonegoro merupakan suatu cara handal dalam mewujudkan cita-cita rumah sakit yaitu menjadi rumah sakit yang profesional dan Islami. Walaupun dalam implementasi *Good Corporate Governance* di RSA Bojonegoro belum mencapai suatu tingkat kesempurnaan, akan tetapi dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh organ-organ yang ada di rumah sakit pencapaian tingkat pelaksanaan *Good Corporate Governance* di RSA Bojonegoro telah dapat dikategorikan baik. Selanjutnya, dengan terus ditingkatkannya pola kerja, disiplin kerja, mutu dan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia, diharapkan RSA Bojonegoro dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik benar-benar dapat mendekati kesempurnaan. Karena di dunia ini tiadalah yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.
- b. Dalam perspektif Islam, implementasi *Good Corporate Governance* di RSA Bojonegoro memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar Islami

yaitu nilai tauhid, nilai *khilafah*, nilai ibadah, kemudian nilai *tazkiyah*, dan nilai *ihsan*. Dari beberapa nilai dasar diatas, satu nilai yang paling utama sebagai dasar dalam mewujudkan implementasi *Good Corporate Governance* yang beretika bisnis Islami adalah nilai *tazkiyah*. Artinya bahwa dalam berbisnis tingkat kejujuran, keadilan, dan keterbukaan sangatlah dipentingkan. Dengan adanya hal-hal tersebut maka kemungkinan terjadinya sesuatu yang negatif seperti malpraktek, pelayanan yang kurang ramah, mutu yang tidak baik, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat minim sekali. Sehingga nilai-nilai Islam dalam RSA Bojonegoro yang dikelola oleh organisasi persyarikatan Muhammadiyah selalu terjaga dan membawa berkah.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkannya disiplin kerja, pola kerja, mutu dan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sumber daya manusia organ-organ yang ada di RSA Bojonegoro. Hal tersebut karena selama ini masih banyak karyawan ataupun pejabat struktural serta direksi yang kurang dapat *on time* dalam bekerja dan kurang bersungguh-sungguh.
- b. Perlu adanya pelatihan-pelatihan di lingkup internal RSA Bojonegoro khusus seperti sosialisasi, seminar atau diklat dalam meningkatkan pemahaman dan *skill* karyawan tentang *Good Corporate Governance*. Sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan etika bisnis Islami betul-betul dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Arifin, Johan., 2009, *Etika Bisnis Islami*, Cetakan pertama, Walisongo Press, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Beekun, Rafik Issa., 2004, *Etika Bisnis Islami*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, Muhammad Arief., 2005, *Peran Etika Bisnis dan Moralitas Agama Dalam Implementasi GCG*, [urnal Ilmiah, Vol. 2 No.1, di terbitkan oleh STEI Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia LPPI.

- Kaihatu, Thomas S., 2006, *Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia*, jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra.
- Khairandy Ridwan dan Malik Camelia, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Lukviarman Niki, 2004, *Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa dalam Corporate Governance?*, Jurnal Siasat Bisnis, No.9, Vol. 2.
- Muhammad, 2002, *Etika Bisnis Islami*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2009, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rais, M. Amin, 2004, *Arti dan Fungsi Tauhid*, Jurnal AI Manar, Edisi 1.
- Riduan, 2008, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Cetakan Keempat, Alfabeta, Bandung.
- Sulistyanto Sri, 2003, *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?*, Jurnal Widya Warta No.2 Tahun XXVI Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata, Semarang.
- Suprayitno G dkk. 2009, *Corporate Governance Perception Index 200B, Good Corporate Governance dalam Perspektif Manajemen Strategik*, Cetakan Pertama, The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta.
- Trisnantoro Laksono, 2006, *Memalw.mi Penggunaan Manajemen Rumah Sakit*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Warsono Sony dkk, 2009, *Corporate Governance Concept and Model*, Cetakan Pertama, CGCG Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Yusuf Muhammad dan Wiroso, 2007, *Bisnis Syari'ah*. Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Zarkasyi Wahyudin, 2008, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan [asa Kwangan Lainnya*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.